

ANALISIS PENGUATAN SUMBERDAYA DAERAH DALAM PELAKSANAAN *SMART GOVERNANCE* DI KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR

Muh. Ilham, Irfan Setiawan, dan M. Nawawi,

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor

Email: muh_ilham@ipdn.ac.id, irfansetiawan@ipdn.ac.id, m_nawawi@ipdn.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to study and analyze the application of smart governance in the city of Balikpapan, strengthening regional resources in the implementation of smart governance, and strengthening local government resources in supporting smart governance. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The research subject was purposive, in order to get research subjects who knew and could provide information about regional resources and the application of smart governance in Balikpapan City. The results of the analysis and discussion found that the implementation of smart governance in the city of Balikpapan in serving the needs of the community can be implemented well if coupled with strengthening local government resources that include institutions, budgets and IT devices, increasing community participation and use of applications. The condition of regional resources in implementing smart governance in Balikpapan City is still low and lacking in the dimensions of regional governance, as well as the low use of the applications provided. The implementation of smart governance in the city of Balikpapan in serving the needs of the community can be well implemented when coupled with the strengthening of regional government resources.

Keywords : *regional resources, smart governance, information and communication technology*

PENDAHULUAN

Inovasi daerah melalui penerapan *smart city* pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan salah satu kebijakan negara Indonesia untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Konsep *smart city* telah menjadi solusi atas persoalan pembangunan di banyak negara (Mauricio Bouskela dkk, 2016:135). *Smart City* didesain agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal di segenap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan konsep ini mampu diwujudkan pada kota-kota di Indonesia sehingga dapat menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat dan diharapkan juga mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi oleh suatu kota, misalkan pada aspek transportasi, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya. kota pintar adalah kota yang efektif, model sosio-teknis yang kompleks, termasuk sumber daya teknologi untuk kehidupan cerdas, bersama dengan standar ekologis, dan juga standar perilaku baru (Guzel Ishkineeva dkk 2015).

Hal ini diperlukan pemerintah daerah guna mengantisipasi jumlah penduduk yang terus berkembang. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat baik melalui peningkatan angka kelahiran maupun dengan adanya urbanisasi di wilayah kota yang dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti; kemacetan, semakin kurangnya lahan pemukiman, pelayanan publik yang kurang berkualitas,

susah mencari lokasi parkir, semakin bertumpuknya sampah, kriminal yang semakin tinggi, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk memecahkan permasalahan tersebut sehingga kota terasa nyaman bagi masyarakatnya dibutuhkan penyelesaian masalah secara cerdas. Solusi cerdas tersebut adalah menerapkan konsep *smart city*.

Di Indonesia, regulasi kebijakan yang mengatur pengembangan konsep *smart city* terdapat pada pasal-pasal tentang inovasi daerah yang termuat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Maka dari itu, penerapan konsep *smart city* di beberapa daerah di Indonesia berbeda satu sama lainnya tergantung beberapa aspek sumber daya yang di miliki oleh daerah tersebut.

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang meraih penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) tahun 2015 versi Harian Kompas dengan kategori kota berpenduduk antara 200 ribu hingga 1 juta jiwa. Kota Balikpapan meraih juara ke 2 setelah kota Yogyakarta. Ada 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar penilaian kota cerdas versi Harian Kompas yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Kota yang dianggap telah menerapkan konsep cerdas berarti bisa memenuhi kebutuhan dan memecahkan persoalan warga di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Harian Kompas melakukan penilaian dan mengindeks pada 93 kota dari 98 kota di Indonesia berdasarkan ke 3 aspek tersebut (www.balikpapan.go.id).

Penghargaan yang diterima tersebut merupakan upaya dan hasil kerja keras dari stakeholder yaitu masyarakat, pihak swasta maupun pemerintah Kota dalam membangun dan memberdayakan kota Balikpapan. Penerapan *smart city* di Kota Balikpapan tertuju di mulai pada

penerapan *smart governance* pada keamanan kota, pelayanan publik online, dan penyelenggaraan pemerintahan secara online.

Beberapa program yang dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan *smart governance* di Balikpapan seperti, program pengembangan *smart governance* yang difokuskan pada pelayanan publik dan penataan birokrasi. Salah satu program pelayanan publik melalui program aplikasi *Hospital Online Reservation* atau “HORE”. Aplikasi layanan online tersebut merupakan hasil kemitraan antara operator XL Axia-ta, STMIK Balikpapan, dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat kota Balikpapan dapat memantau dan mencari kamar yang tersedia dan layanan di rumah sakit terlebih dahulu tanpa harus ke Ruma sakit, namun cukup mengakses layanan online dimanapun dan kapan pun. Namun sejauh ini aplikasi HORE tersebut belum banyak dipahami oleh masyarakat banyak di Kota Balikpapan, karena apilkasinya hanya diunduh oleh 50-100 orang pengguna, aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Balikpapan belum banyak digunakan oleh masyarakat. Bahkan bukan merupakan layanan publik populer bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Balikpapan. Fenomena tersebut menandakan bahwa perbaikan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah kota Balikpapan belum banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat. Sementara penggunaan sumber anggaran untuk penyediaan pelayanan publik ini tidaklah sedikit.

Pemerintah Kota Balikpapan juga membangun aplikasi layanan berbasis android yaitu *Digital Government Balikpapan* guna mendukung sistem

pemerintahan online. Namun kenyataannya terlihat bahwa *Digital Government Balikpapan* hanya diunduh sebanyak 100 kali download, hal ini menandakan bahwa pengguna layanan ini hanya paling banyak hanya 100 diantara 6283 jumlah pegawai Kota Balikpapan atau sekitar 1,59 % dari jumlah pegawai Kota Balikpapan. Di bidang pelayanan pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan mengembangkan penerapan cara belajar yang menggunakan e-learning diterapkan secara bertahap di beberapa sekolah-sekolah. Fenomena penerapan e-learning ini sudah tepat untuk mendukung kota Balikpapan dalam menerapkan *smart governance*. Namun kendala yang terjadi di lapangan, tidak semua sekolah mampu menerapkan e-learning disebabkan sekolah kurang memiliki sarana dan prasarana yang bagi guna menunjang penerapan *e-learning*. Pada dinas-dinas dan kantor lainnya seperti kecamatan dan kelurahan terdiri dari 2-3 orang pengelola IT namun tidak terdata dengan baik dan tak ada jaminan dalam pengembangan karier, karena sewaktu-waktu dapat dipindahkan untuk menangani urusan lain di luar IT. Kendala yang lain dalam penyelenggaraan e-learning di Kota Balikpapan yaitu masyarakat harus bersiap menyesuaikan mindset terlebih dahulu sesuai pemahaman e-learning tersebut.

Fenomena lain yang ditimbul dalam penerapan konsep *smart governance* adalah dari segi anggaran, penerapan konsep *smart governance* dapat berdampak pada meningkatnya pengeluaran anggaran pengeluaran dan belanja daerah kota atau kabupaten, makanya penerapan konsep ini banyak diimplementasikan pada daerah yang memiliki tingkat pendapatan tinggi.. Pemerintah Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2017 menyiapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.810.758.387.000,-. dari APBD tersebut, alokasi anggaran untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 12.262.832.618,-. Selain ini perlunya koordinasi dan dukungan yang penuh dari setiap *stakeholder* daerah Kota Balikpapan, agar tidak terjadi salah persepsi antar *stakeholder* terkait pemahaman akan konsep *smart governance*. Penyatuan pemahaman antara adat budaya dan modernisasi sering menghadapi hambatan yang serius baik oleh pelaksana maupun masyarakat pengakses program yang ditawarkan oleh konsep *smart governance*.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam ilmu ekonomi dan manajemen di kenal banyak jenis dan kategorisasi sumber daya sebagaimana di uraikan sebelumnya di atas. Begitu pula daerah kota dapat dianonimkan sebagai sebuah organisasi atau perusahaan sehingga memiliki sumber daya baik fisik maupun non fisik. Sebagaimana Barney mengkategorikan tiga jenis sumber daya: Modal sumber daya fisik, Modal sumber daya manusia, dan Modal sumber daya organisasi.(Barney, 1991 : 99-120)

Ndraha mengemukakan bahwa menurut teori governance, bila pemerintah daerah dianggap setara dengan local government dan perdefenisi governance diartikan sebagai interaksi antara subkultur ekonomi (SKE, swasta, badan usaha, kekuatan sosial ekonomi), subkultur kekuasaan/politik (SKK, pemerintah daerah, birokrasi, local governance) dan subkultur sosial (SKS, LSM, pelanggan, kekuatan sosial politik) maka pemerintahan daerah=local governance (Ndraha, 2005:57). Sehingga dalam pemahaman tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada tiga unsur yang berinteraksi

yaitu sub kultur ekonomi, sub kultur kekuasaan dan sub kultur sosial.

Konsep *smart governance* merupakan salah satu dimensi dalam penerapan *smart city*. Griffinger dkk (2007:10-14) menjelaskan 6 (enam) dimensi dalam konsep *smart city* sebagai dasar dari penerapan *smart city* yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks *smart city* 70 (tujuh puluh) kota di Eropa. Indikator dari Griffinger tersebut dipakai sebagai proses penilaian terhadap kota-kota yang telah menerapkan konsep *smart city*. *European Smart Cities* (www.smart-cities.eu) meranking kota-kota *medium size* mana saja yang telah memenuhi 6 (enam) kriteria *smart city* yakni *smart economy*, *smart people*, *smart government*, *smart mobility*, *smart environment* dan *smart living*.

Pada konsep tersebut dimensi *smart governance* terdiri dari sub dimensi *Participation in decision making*, *public and social service*, *transparent governance* dan *political and strategis perfectives*. Johnston and D. L. Hansen (2011:1-30) mengemukakan bahwa *governance infrastructure is the collection of technologies, people, policies, practices, resources, social norms, and information that interact to support governing activities* *Smart governance infrastructures augment society's ability to organize, interact, and govern*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana permasalahan diajukan dalam penelitian ini dikaji sesuai dengan tema konsep sumber daya dan *smart governance*. Guna memperoleh informasi yang jelas tentang dukungan sumber daya dan penerapan *smart governance* di Kota

Balikpapan, peneliti memilih subyek penelitian dengan cara *purposive*. Kriteria yang ditentukan peneliti bahwa subyek-subyek yang dipilih adalah mereka yang lebih mengetahui dan dapat memberikan informasi tentang dukungan sumber daya dan penerapan Balikpapan *smart governance*.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah dan disajikan secara dekriptif sehingga peneliti dapat memperoleh informasi data sebagai bahan analisis. Dalam menganalisis data peneliti akan menggunakan Model Interaktif sebagaimana yang telah digambarkan Matthew B. Miles & A.M.Huberman (1992 : 20).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

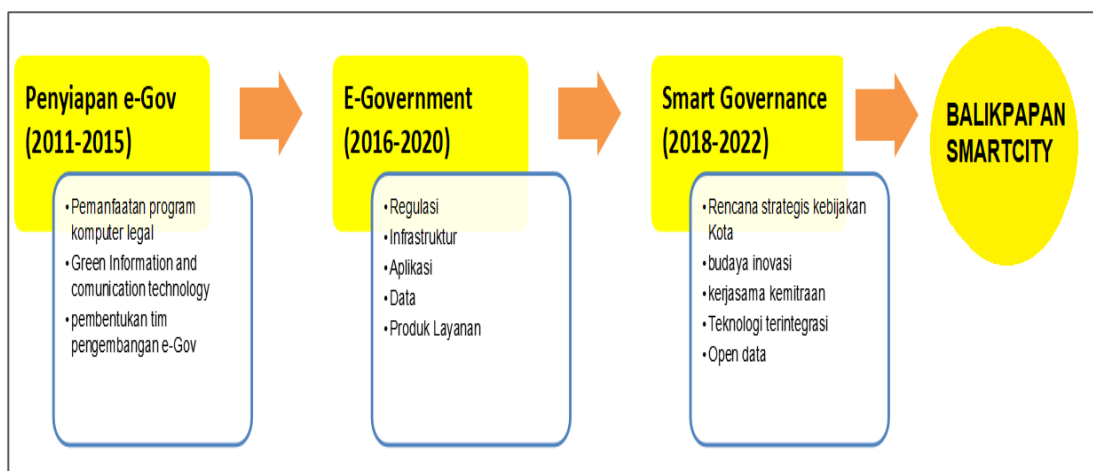
Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang merespon perkembangan revolusi digital dengan menyelenggarakan berbagai kebijakan yang inovatif. Berdasarkan dokumen Blueprint Smart Governance menuju Smartcity Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2020 menjelaskan bahwa penerapan kebijakan *smart governance* di Kota Balikpapan diawali dengan pengembangan 3 (tiga) pilar *e-Government*, meliputi Suprastruktur, infostruktur dan infrastruktur (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, 2017: 18). Sprastruktur meliputi pembentukan dinas komunikasi dan informatika Kota Balikpapan, regulasi terkait baik yang berbentuk Peraturan daerah maupun peraturan walikota, rencana induk dan dokumen blueprint. Kemudian pilar infrastruktur meliputi pembangunan pusat data dan pembenahan jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara pilar infostruktur meliputi

pembangunan datawarehouse sebagai fondasi integrasi sistem informasi/aplikasi.

Kota Balikpapan mengendalikan arah pengembangan *smart governance*, melalui penyusunan Model *Smart Governance* yang berfungsi sebagai pedoman bagi Kepala Daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang terintegrasi sesuai RPJMD 2016-2021 yang di dukung dengan penerapan aplikasi IT. Untuk itu kota Balikpapan mengembangkan Blueprint *Smart Governance* Menuju *Smart City* Pemerintah Kota Balikpapan 2017, yang meliputi bidang infrastruktur, infostruktur dan suprastruktur yang dilandasi dengan tata kelola dan manajemen yang baik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *smart governance* di Kota Balikpapan, Pemerintah Kota telah melakukan berbagai persiapan, kebijakan, implementasi pada berbagai bidang sebagaimana yang telah di uraikan pada point sebelumnya. Proses persiapan dilakukan sejak tahun 2011 melalui pemanfaatan teknologi komputer legal, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan dan penetapan *blueprint e- Government* bidang aplikasi Pemerintah Kota Balikpapan. Kemudian tahap selanjutnya memasuki tahap Pengembangan dan Pengelolaan *e- Government* dan selanjutnya tahap penyelenggaraan *smart governance* hingga menuju tahap *smart city*. Untuk lebih jelasnya sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 1
Fase Smart Governance Kota Balikpapan Menuju Smartcity



Sumber: Hasil Penelitian 2018

Fase penyiapan dan proses penyelenggaraan smart governance Kota Balikpapan Menuju *Smartcity*, dimana Pada Fase Penyiapan ditandai dengan Kebijakan pemanfaatan program komputer legal dimaksudkan agar aparatur pemerintah Kota Balikpapan menggunakan program komputer legal dan tidak lagi

menggunakan program komputer yang tidak legal pada perangkat komputer/laptop di tempat kerjanya. Begitu pula pada pengadaan komputer (server, pc laptop/notebook) diarahkan agar membeli yang menggunakan perangkat lunak legal dan berlisensi.

a. *Green Information dan Communication*

Technology/Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ramah lingkungan bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran dan dapat merubah perilaku aparatur di Kota Balikpapan untuk berperilaku ramah lingkungan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Pembentukan Tim pengembangan e-Government merupakan pengembangan rencana penerapan dan pengelolaan e-Government di Kota Balikpapan

Setelah Fase penyiapan selesai, Pemerintah Kota Balikpapan menuju Fase penyelenggaraan e-Government melalui arah kebijakan dan strategi yang tertuang Dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2020, dengan arah pengembangan :

- a. Pembuatan regulasi penyelenggaraan e-Government.
- b. Pembangunan Infrastruktur untuk penyelenggaraan e government.
- c. Pengembangan Aplikasi tematik terintegrasi yang melibatkan perangkat daerah yang terkait yang lebih fokus pada layanan publik, antara lain aplikasi pengentasa kemiskinan, bantuan sosial, kewilayahan, kemasyarakatan, kebencanaan, investasi dan informasi publik berbasis web 3.0.
- d. Pengintegrasian data agergat dalam data warehouse, Pengelolaan dan analisis data agregat di summary Information System untuk kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dan deseminasi informasi publik.
- e. Produk/layanan yang di sediakan yaitu:
 - 1) Aplikasi pelayanan publik seperti LPSE, Perijinan, SIAK, SIMKEL, SIM-Akta lahir, SIM Kartu

Kuning, Simo, Hore, Simpus, dan Uji Kir Kendaraan.

- 2) Aplikasi administrasi dan manajemen umum meliputi: SIMDA, e-kinerja, dan SIM-SPPD
- 3) Administasi legislasi berupa JDIIH
- 4) Aplikasi manajemen pembangunan terdiri atas SIMONTEPPA dan SIMTARU
- 5) Aplikasi manajemen keuangan meliputi: SIPPKD, POSPBB, SIMAPA dan e-Tax
- 6) Aplikasi manajemen kepegawaian terdiri dari SIMPEG dan SIMPEG guru

Kemudian setelah Fase penyelenggaraan e-Government berjalan dengan baik, mulai tahun 2018 Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan Fase penyelenggaraan *Smart Governance*, dengan arah pengembangan :

- a. Rencana strategis kebijakan kota yang melalui perwujudan visi kota yang melibatkan para pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh organisasi perangkat daerah.
- b. Mengembangkan budaya inovasi yang didorong melalui peningkatan kualitas dan kuatitas SDM TIK, membina UKM yang memiliki daya saing tinggi dan kemampuan untuk membangun kemitraan strategis dengan pihak eksternal, dan mewujudkan budaya komunikasi
- c. Mengembangkan kerjasama kemitraan
- d. Mengembangkan teknologi terintegrasi
- c. Mengembangkan open data dengan pengamanan dan perlindungan data

Proses penyelenggaraan pada tiap Fase Penyiapan dan penyelenggaraan e-government berjalan dengan baik hingga tahun 2017. Pemerintah Kota Balikpapan pada tahap awal penerapan *smart governance* di tahun 2018 belum

sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada kurangnya proses penguatan pada sumber daya pemerintahan daerah. Hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa penguatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan aplikasi, pembangunan infrastruktur, namun belum

pada pendidikan dan sosialisasi ke masyarakat mengenai beberapa program dan aplikasi yang dapat digunakan guna mempermudah proses pelayanan masyarakat, masih sebatas peningkatan kompetensi aparatur pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Analisis Sub Dimensi Hasil Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Sub Dimensi	Keterangan
1	Smart Governance	<i>Participation in decision making</i>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan	Rendah Rendah
		Public and social service	Infrastruktur pelayanan publik dan sosial Layanan aplikasi sosial yang tersedia Penggunaan TIK Akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	Baik Baik Tinggi Baik
		Transparent governance	Ketersediaan informasi pemerintah Transparansi aparatur Transparansi manajemen pemerintahan	Baik Baik Baik
		Political and strategic & perspective	Dasar Kebijakan penerapan smart gov Perspective pemerintah terhadap smart governance	Disiapkan Mendukung
2	Sumber Daya Daerah	Pemerintah Daerah	Kelembagaan Anggaran pembuatan & pengelolaan aplikasi Kompetensi SDM pengelola	Kurang Rendah Kurang
		Penyedia Layanan	Adanya penyedia layanan Adanya kemitraan	Tersedia Kerjasama
		Masyarakat Pengguna	Tanggapan masyarakat pengguna aplikasi Penggunaan masyarakat terhadap aplikasi yang disediakan	Baik Rendah

Sumber: Hasil Analisis data Penelitian 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa penerapan *Smart Governance* di Kota Balikpapan sudah berjalan dengan baik dimana sub dimensi *Public and Social Service*, *Transparent Governance* dan *Political Strategic and Perspective* terlihat terlaksana dengan baik dan mendukung, kecuali pada *participation in decision making*. Pemerintah Kota Balikpapan telah berkomitmen untuk menyiapkan dan menerapkan *smart*

governance baik dari segi dukungan kebijakan, infrastruktur dan penggunaan aplikasi online. Kendala yang dihadapi yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat Kota Balikpapan juga terlihat pada beberapa litelatur dan media massa seperti hasil penelitian Dea Deviyanti (2013), Syahrul Karim (2017), dkk, dan berita online

<http://balikpapan.prokal.co> yang menunjukkan perlunya pemerintah daerah Kota Balikpapan untuk menggalakkan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah kota sehingga masyarakat dapat mengerti manfaat kebijakan pemerintah dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Balikpapan.

Dalam proses penguatan sumber daya pemerintahan daerah dalam mendukung penerapan *smart governance* di Kota Balikpapan terlihat bahwa selama ini belum maksimalnya proses tersebut berjalan. Kebijakan pengembangan *smart governance* yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan masih kurang mendukung pada sub dimensi kelembagaan, anggaran dan sumber daya aparatur pengelola aplikasi serta penggunaan masyarakat terhadap aplikasi yang ada.

Dari segi kelembagaan, belum adanya wadah sebagai *command centre* di Kota Balikpapan walaupun telah terbentuk Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Balikpapan, namun belum menata dan menghimpun berbagai inovasi dan aplikasi yang ada pada tiap instansi pemerintah Kota Balikpapan, Bahkan link website Dinas, belum aktif sepenuhnya. Link telah terhubung dengan link website <http://balikpapan.go.id/instansi/> namun setelah di buka, akan kembali pada alamat web <http://balikpapan.go.id/instansi/>.

Dari 18 link web Dinas-dinas di Kota Balikpapan, terdapat 6 link yang tidak terbuka dan kembali pada link instansi <http://balikpapan.go.id/instansi/>. dan dari 10 Link Badan-Badan yang tercantum dalam link website instansi Kota Balikpapan, <http://balikpapan.go.id/instansi/>, terdapat 5 link yang tidak aktif dan kembali pada link

instansi. Kurangnya penguatan terhadap kelembagaan dapat mengakibatkan agak terhambatnya proses penerapan *smart governance* yang dicanangkan Kota Balikpapan, apalagi link Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Balikpapan masih belum aktif berserta instansi lainnya.

Hal lainnya yaitu anggaran yang disediakan dalam APBD 2017 untuk alokasi anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi berada di bawah 1% yaitu hanya sebesar 0,677% dari APBD, masih jauh bila dibandingkan dengan postur anggaran yang ideal 2% menurut best practice Earnest and Young.

Begitupun pula pada sub dimensi sumber daya aparatur yang masih kurang dikarenakan seringnya terjadi mutasi dan promosi pada aparat yang menangani aplikasi, namun tidak pada pekerjaan yang sama atau yang berkaitan dengan aplikasi, yang menggantinya pun harus dilatih lagi.

Begitu pula pada kondisi masyarakat yang masih kurang dalam penggunaan aplikasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial. Terdapat sekitar 87,88 % masyarakat kota Balikpapan yang menggunakan telepon selular, dan sekitar 52,11 % yang mengakses sosial media (BPS, 2017), namun hanya sekitar 0,31% atau ± 1000 orang yang mendownload aplikasi online mengenai pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial lokal. Hal ini terlihat berdasarkan jumlah user atau pengguna yang mendownload aplikasi lokal seperti TMC, kafeku Balikpapan dan I Balikpapan, sementara aplikasi lainnya, hanya didownload oleh ± 500 dan 10 orang user.

Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kota Balikpapan, karena dukungan pihak swasta penyedia layanan internet yang begitu besar bagi Kota Balikpapan, harus dibarengi pengembangan sumber daya pemerintahan

dan sumber daya masyarakat. Untuk sumber daya pemerintahan, penataan penerapan *smart governance* yang baru memasuki tahap awal sehingga masih banyak terlihat kekurangan.

Dalam pengembangan *smart governance* di Kota Balikpapan tahun 2018-2022, pemerintah kota mengarahkan pada *smart service, smart experience dan smart business*, melalui pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi terpadu yang didasari oleh tata kelola manajemen yang baik. Pengembangan *Smart Governance* di Kota Balikpapan

diprioritaskan pada integrasi data dan sistem informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik yang wajib, urusan pilihan maupun unsur penunjang yang ada saat ini dan akan dikembangkan di masa akan datang.

Rendahnya sub dimensi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta sub dimensi dukungan dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat perlu disikapi pemerintah daerah Kota Balikpapan dengan menguatkan sub dimensi tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Analisis Kesenjangan Sub Dimensi

No.	Sub Dimensi	Kondisi	Harapan	Rekomendasi
1.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Rendah	Meningkat	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Pengembangan wadah forum komunikasi di tingkat kelurahan Sosialisasi dan komunikasi dua arah
2.	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan	Rendah	Meningkat	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan Pengembangan wadah forum komunikasi di tingkat kelurahan Sosialisasi dan komunikasi dua arah yang seimbang
3.	Kelembagaan	Rendah	Meningkat	Penyusunan pedoman TIK yang melibatkan seluruh peangkat daerah Pembangunan command center sebagai pusat pelayanan informasi dan konsultasi serta koordinasi TIK Pembenahan organisasi perangkat daerah menuju learning organisation yang adaptif
4.	Anggaran pembuatan & pengelolaan aplikasi	rendah	Meningkat	Meningkatkan penganggaran TIK minimal 3% dari APBD
5.	Kompetensi SDM pengelola	Rendah	Meningkat	Peningkatan kualitas serta kuantitas SDM TIK melalui diklat dan penerapan jabatan fungsional pada SDM TIK
6.	Penggunaan masyarakat terhadap aplikasi yang disediakan	Rendah	Meningkat	Pembinaan UKM berbasis aplikasi online yang memiliki daya saing yang tinggi dan kemampuan untuk membangun kemitraan strategis dengan pihak eksternal Fasilitasi dengan UKM berbasis aplikasi online guna pengembangan produk inovasi yang memberikan keuntungan yang kompetitif Sosialisasi masyarakat mengenai produk UKM berbasis aplikasi online unggulan dan inovatif Membangun kemitraan antara OPD dengan pihak swasta untuk mengembangkan aplikasi online yang inovasi dan dibutuhkan masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis data Penelitian 2018

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kota Balikpapan dalam

penyelenggaraan *smart governance* guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penerapan *smart governance* di Kota Balikpapan dalam melayani kebutuhan

masyarakat dapat terlaksana dengan baik bila dibarengi dengan penguatan sumber daya pemerintahan daerah yang meliputi pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat yang melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menuju kehidupan masyarakat yang berkualitas dan pemerintahan yang partisipatif.

Untuk itu Pemerintah Kota Balikpapan perlu membuat kebijakan dan program dalam penguatan sumber daya pemerintahan daerah dalam mendukung penerapan *smart governance*. Penguatan sumber daya daerah tersebut terbagi dalam sektor pemerintah daerah dan sektor masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sektor Pemerintah Daerah

- a) Penyusunan pedoman TIK yang melibatkan seluruh perangkat daerah
- b) Pembangunan command center sebagai pusat pelayanan informasi dan konsultasi serta koordinasi TIK
- c) Pembenahan organisasi perangkat daerah menuju learning organisation yang adaptif
- d) Peningkatan penganggaran TIK minimal 3% dari APBD
- e) Peningkatan kualitas serta kuantitas SDM TIK melalui diklat dan penerapan jabatan fungsional pada SDM TIK

2. Sektor Masyarakat

- a) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
- b) Pengembangan wadah forum komunikasi di tingkat kelurahan
- c) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan
- d) Pengembangan wadah forum komunikasi di tingkat kelurahan
- e) Sosialisasi dan komunikasi dua arah yang seimbang dalam

penyelenggaraan pembangunan khususnya mulai dari tingkat kelurahan.

- f) Pembinaan UKM berbasis aplikasi online yang memiliki daya saing yang tinggi dan kemampuan untuk membangun kemitraan strategis dengan pihak eksternal
- g) Fasilitasi dengan UKM berbasis aplikasi online guna pengembangan produk inovasi yang memberikan keuntungan yang kompetitif
- h) Sosialisasi masyarakat mengenai produk UKM berbasis aplikasi online unggulan dan inovatif.
- i) Membangun kemitraan antara OPD dengan pihak swasta untuk mengembangkan aplikasi online yang inovasi dan dibutuhkan masyarakat.

KESIMPULAN

- a. Penerapan *smart governance* di Kota Balikpapan berjalan dengan baik pada dimensi *public and sosial service*, dan *transparent govenance*, kemudian didukung dengan penyiapan dasar kebijakan dan perfective pemerintahan pada penerapan *smart govenrnance* pada dimensi *political strategic dan perspective*, namun penerapan *smart govenance* tersebut masih rendah pada *participating in decision making* dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan masih rendah.
- b. Kondisi sumber daya daerah dalam penerapan *smart governance* di Kota Balikpapan masih rendah dan

kurang dari segi kelembagaan, anggaran dan aparatur pengelola pada dimensi pemerintahan daerah, serta rendahnya penggunaan aplikasi masyarakat terhadap aplikasi yang disediakan, walaupun telah di dukung dalam dimensi penyedia layanan dan baiknya tanggapan masyarakat pengguna terhadap aplikasi pelayanan online

- c. Penerapan *smart governance* di Kota Balikpapan dalam melayani kebutuhan

masyarakat dapat terlaksana dengan baik bila dibarengi dengan penguatan sumber daya pemerintahan daerah yang meliputi kelembagaan, anggaran dan aparatur IT pada dimensi pemerintah daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan penggunaan masyarakat terhadap aplikasi pada dimensi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Balikpapan.go.id, Balikpapan raih peringkat kedua kota cerdas 2015, <http://balikpapan.go.id/berita/detail/6156/balikpapan-raih-peringkat-kedua-kota-cerdas-2015>.
- Balikpapan.go.id, buktikan diris sebagai kota cerdas, <http://balikpapan.prokal.co/read/news/171114-buktikan-diri-sebagai-kota-cerdas>.
- Barney, 1991, *Firm Resources and Sustained Competitive Advantage*", *Journal of Management*,. Vol.17 No. 1, pp. 99-120
- Bouskela, Mauricio dkk, 2016, *The Road toward Smart Cities, Migrating from Traditional City Management to the Smart City, Inter-American Development Bank (IDB)*.
- BPS, 2017, Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2017.
- Dea Deviyanti, 2013, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, *eJournal Administrasi Negara*, [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL%20DEA%20\(05-24-13-09-02-30\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL%20DEA%20(05-24-13-09-02-30).pdf).
- Griffinger, R., dkk, 2007, Smart cities Ranking of European medium-sized cities. Final report October.
- Guzel Ishkineeva dkk, 2015, Major Approaches towards Understanding Smart Cities Concept, Kazan Federal University, Kazan, Russia Federation.
- Johnston and D. L. Hansen, "Design lessons for smart governance infrastructures," *American Governance*, vol. 3, pp. 1-30, 2011, <http://nationalresourcenetwork.org/Documents/Document/Document/301940>
- Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.4594/2013 tentang Penetapan Blueprint e-Government Bidang Aplikasi Pemerintah Kota Balikpapan.
- Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18.45-234/2015 tentang Tim Pengembangan dan Pengelolaan e-Government d Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- Miles, Mathew B, dan AM Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press
- Ndraha,, Taliziduhu, 2005, *Kybernology, Sebuah Carta Pembaharuan*, Sirao Credentia Center, Banten.

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan e-Government dengan Ruang Lingkup Perencanaan, Kebijakan, Kelembagaan, Sistem Informasi, dan Infrastruktur TIK.

Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet.

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika,

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Prokal.co.balikpapan Target Meleset, Partisipasi Pemilih Hanya 64,6 Persen, berita 30-06-2018, <http://balikpapan.prokal.co/read/news/233397-target-meleset-partisipasi-pemilih-hanya-646-persen.html>.

Syahrul Karim, Bambang Jati Kusuma, Nur Amalia, 2017, Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Mendukung Kepariwisataaan Balikpapan : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). *Politeknik Negeri Balikpapan*, <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/GBK/article/download/728/576/>.